



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

#MINERBA
#UNTUK
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

UPDATE PERKEMBANGAN PERMASALAHAN MANDIODO PT. ANTAM Tbk.

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Jakarta
22 Juni 2023



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



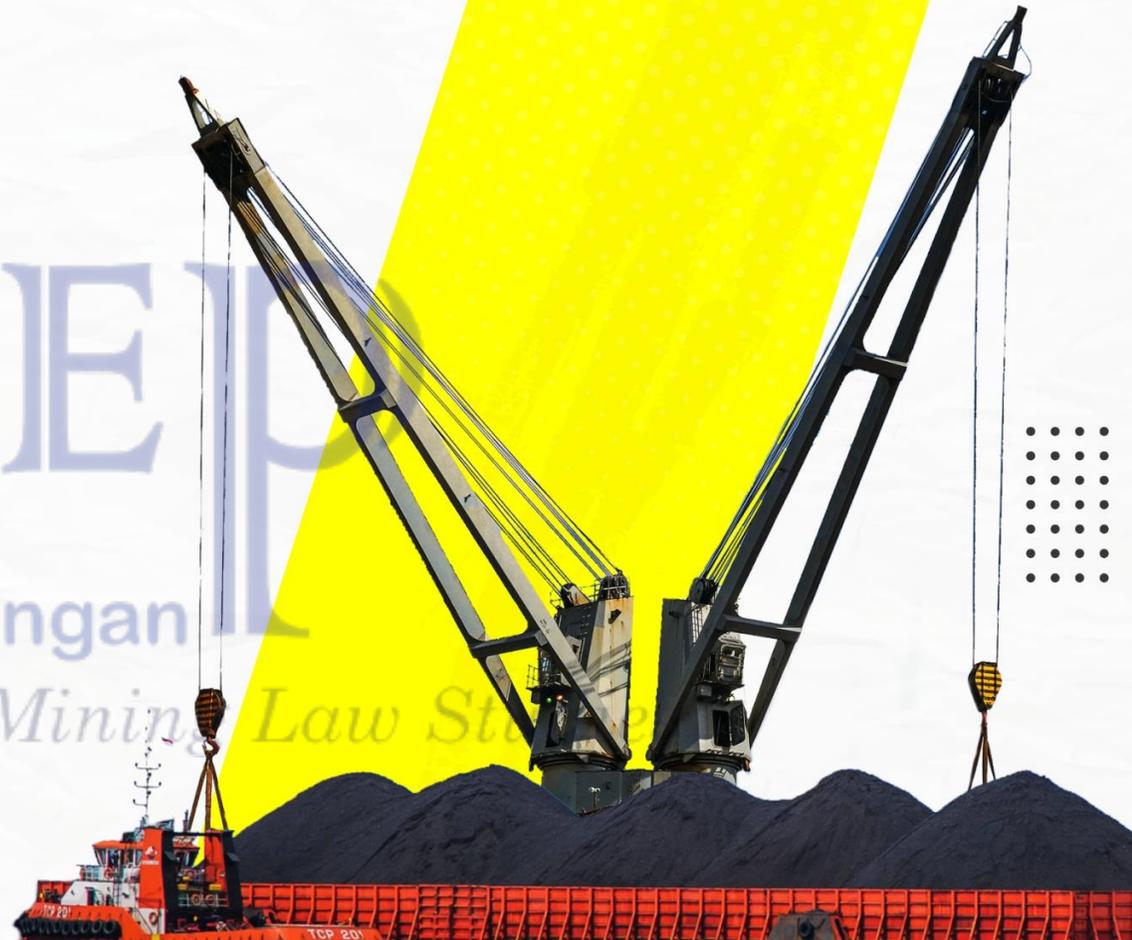
ditjenminerba



minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

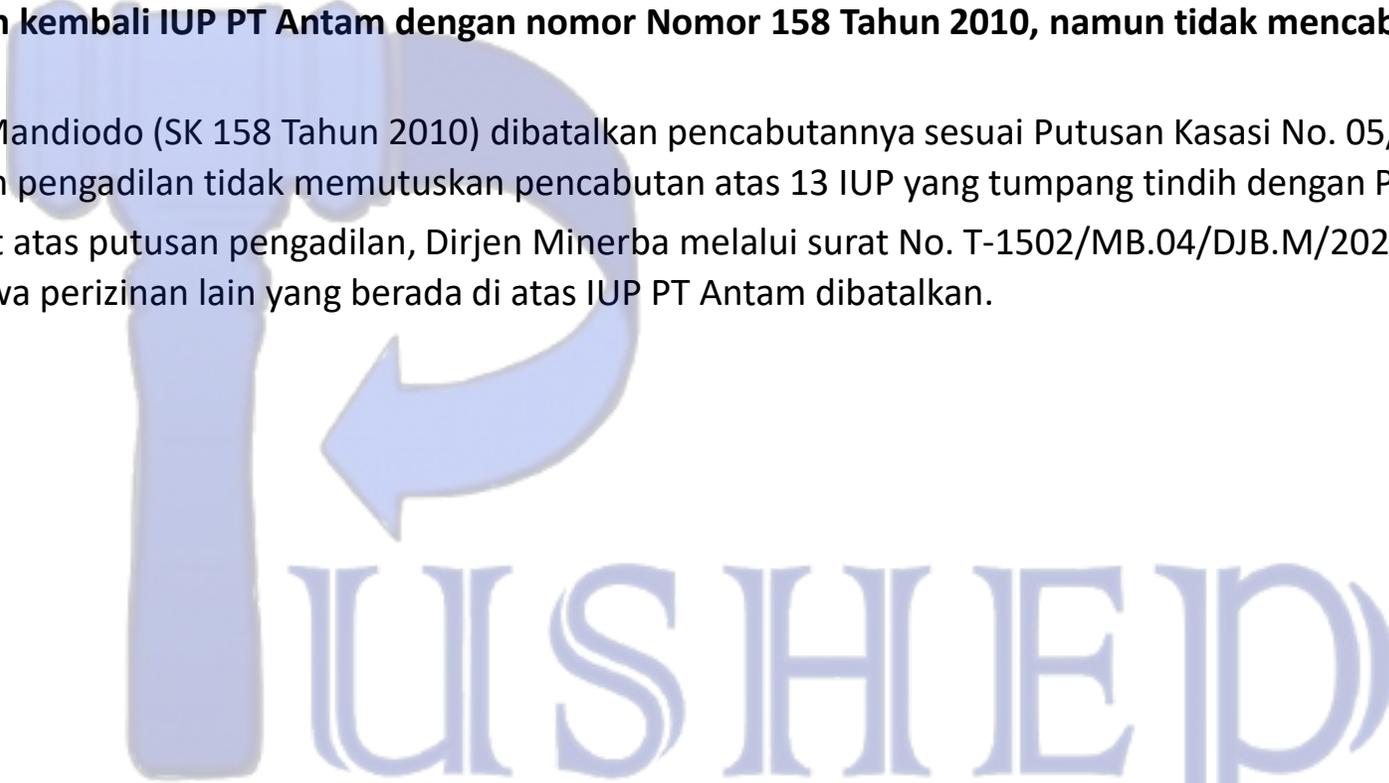


KRONOLOGI PT ANTAM MANDIODO

1. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 849 K/23.01/DJP/1999 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99STP057) tertanggal 26 Oktober 1999 seluas 14.570 Ha;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 81 K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99NPP01) tertanggal 10 Maret 2000 seluas 5.528 Ha; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 87 K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW 99NPP024) tertanggal 10 Maret 2000 seluas 7.714 Ha;
4. Terbit SK Bupati No. 547 Tahun 2003, perihal pemberian SK KP Eksplorasi Nikel dengan luas 3.428 Ha berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2003 s.d 30 April 2006;
5. Terbit SK Bupati No. 344 Tahun 2006, perihal pemberian SK KP Eksplorasi Nikel dengan luas 3.428 Ha berlaku selama I(satu) tahun periode 28 Juni 2006 s.d 27 Juni 2007;
6. Terbit SK Bupati No. 227 tahun 2007 tgl 21 April 2007, tentang Pemberian Ijin Perpanjangan KP Eksplorasi (KW 99 NPP 001) dengan luas 3.047 Ha berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 21 April 2007 s.d 20 April 2010;
7. Terbit SK Bupati Konawe Utara No. 13 tahun 2010 tgl 11 Januari 2010, tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 99 NPP 001) dengan luas 3.047 Ha berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 11 Januari 2010 s.d 11 Januari 2030;
8. *Penggabungan IUP Operasi Produksi Mandiodo (KW 99 NPP 001) & Lalindu-Lasolo (KW 10 PEB ER 001)* Surat PT Antam Tbk No. 1769/2012/PAT/2010 tanggal 26 April 2010, perihal Permohonan Penggabungan IUP Operasi Produksi daerah Mandiodo SK. No. 13 tahun 2010 (KW 99 NPP 001) dan Lalindu SK. No. 105 Tahun 2010 (KW 10 MRT 001);
9. Terbit SK Bupati Konawe Utara No. 158 tahun 2010 tgl 29 April 2010, tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (KW 10 APR OP 005) dengan luas 16.920 Ha, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 29 April 2010 s.d 29 April 2030;
10. Bupati Konawe Utara melalui SK No. 86 Tahun 2012 membatalkan atau mencabut SK OP PT Antam Nomor 158 Tahun 2010;

KRONOLOGI PT ANTAM MANDIODO

11. PT Antam melakukan gugatan, dan memenangkan gugatan tersebut melalui putusan no 225 K/TUN/2014, yang isinya kurang lebih **memerintahkan Bupati mengaktifkan kembali IUP PT Antam dengan nomor Nomor 158 Tahun 2010, namun tidak mencabut IUP-IUP yang tumpang tindih dengan PT Antam.**
12. IUP PT Antam Blok Mandiodo (SK 158 Tahun 2010) dibatalkan pencabutannya sesuai Putusan Kasasi No. 05/2013, 77/2013, 225/2014, sehingga aktif kembali, namun pengadilan tidak memutuskan pencabutan atas 13 IUP yang tumpang tindih dengan PT Antam di Kabupaten Konawe Utara.
13. Sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan, Dirjen Minerba melalui surat No. T-1502/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 23 Desember 2021 menyampaikan bahwa perizinan lain yang berada di atas IUP PT Antam dibatalkan.



WUSHEP

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

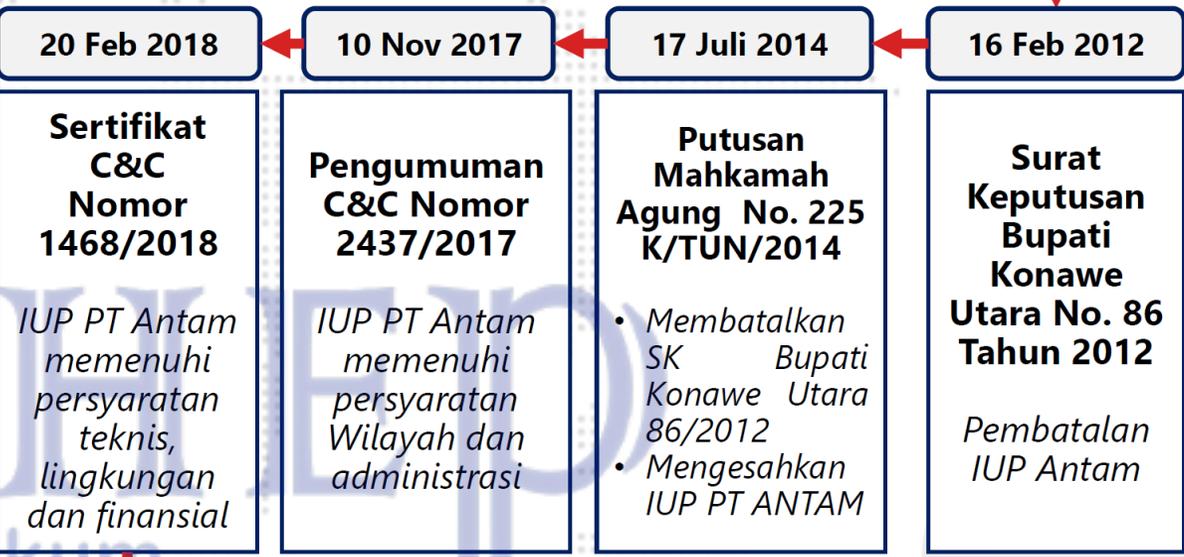
PERJALANAN KEPEMILIKAN & KRONOLOGIS HUKUM

IUP ANTAM DI KONAWA UTARA

Tahun	IUP Termohon PK II			IUP Pemohon PK I	IUP Pemohon PK II
	Desa Lasolo	Desa Lalindu	Desa Mandiodo		
1999	Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum	-	-	PARA PEMOHON PK BELUM DIDIRIKAN & BELUM MEMILIKI IZIN PERTAMBANGAN APAPUN KABUPATEN KONAWA UTARA SULAWESI TENGGARA	
2000	Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum	Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum	Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum		
2001	Kuasa Pertambangan Eksplorasi	Kuasa Pertambangan Eksplorasi	Kuasa Pertambangan Eksplorasi		
2003	Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi				
2004	Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi				
2005	Perpanjangan Ketiga Kuasa Pertambangan Eksplorasi	Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi	Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi		
2006	IUP Eksplorasi	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi		
2007	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi (penggabungan 2 wilayah)	IUP Operasi Produksi		
2008	IUP Operasi Produksi				
2009	IUP Operasi Produksi				
2010	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi		
2011	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi		
2013	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi	IUP Operasi Produksi		
SAAT INI	IUP TERMOHON PK II DIKUATKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 225 K/TUN/2014			TELAH DICABUT OLEH SK 05/2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. K/TUN/2013	



SK Bupati Konawe No. 158 Tahun 2010
tentang Pemberian IUP OP PT Antam Tbk



13 Juli 2020
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 448 K/TUN/2019
Mengesahkan Sertifikat C&C PT Antam

ANEKA TAMBANG

5

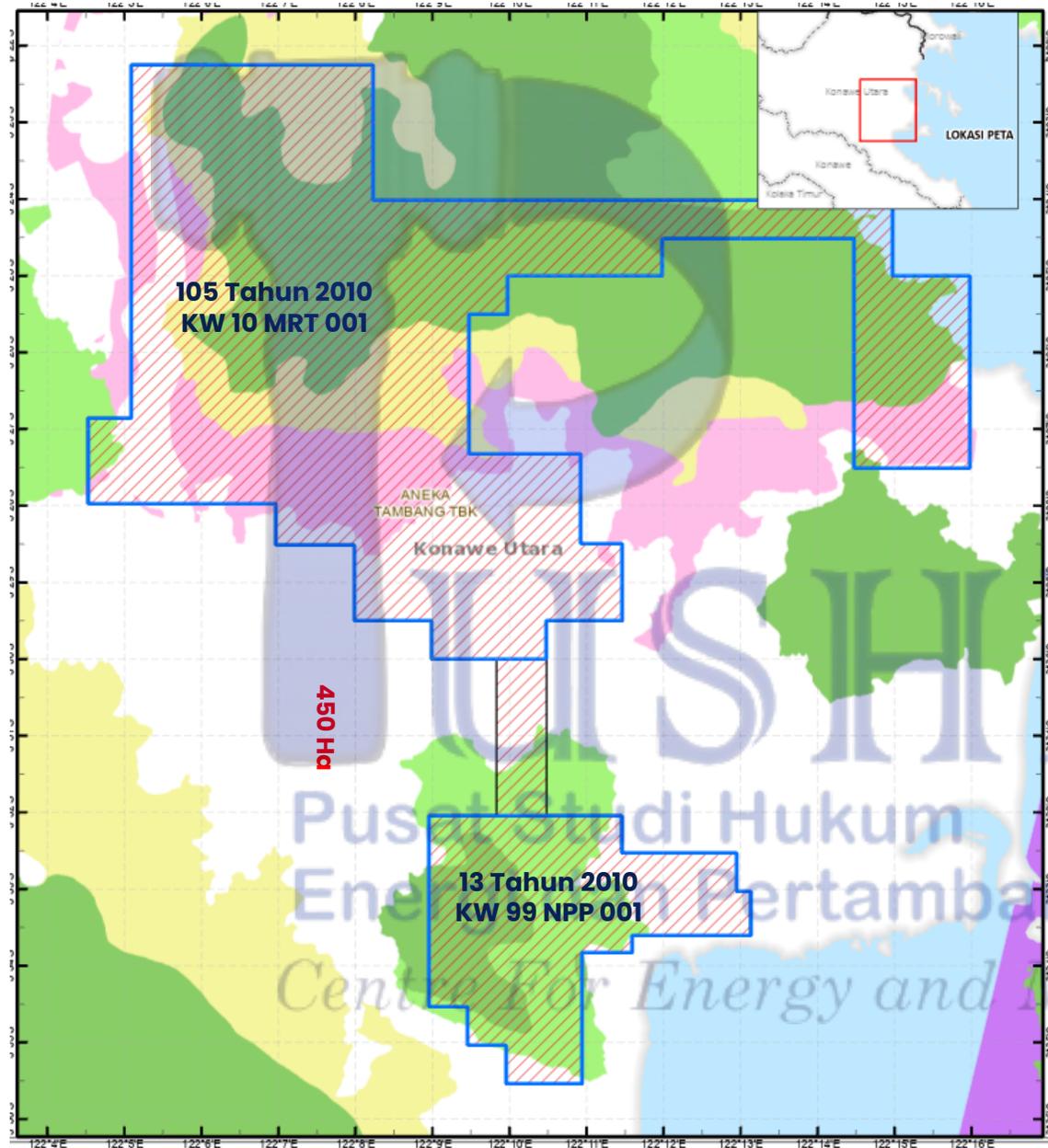


PADA SAAT PT ANTAM DICABUT, BUPATI KONAWE UTARA MENERBITKAN IUP-IUP DI WILAYAH EKS ANTAM MANDIODO, SEHINGGA KETIKA GUGATAN PT ANTAM DIMENANGKAN DAN IUP PT ANTAM DIAKTIFKAN KEMBALI, IUP-IUP TERSEBUT MENJADI TUMPANG TINDIH

IUP-IUP TERSEBUT ANTARA LAIN ADALAH:

1. PT AVRY RAYA 87 Tahun 2012, dicabut dengan SK No 471 Tahun 2014
2. PT HAFAR INDOTECH 123 Tahun 2012, dicabut dengan SK No 436 Tahun 2014
3. PT JAMES & ARMANDO PUNDIMAS 361 Tahun 2013, dicabut dengan SK 50 Tahun 2015
4. PT KARYA MURNI SEJATI 27, 443.1 Tahun 2011
5. PT MALIBU, 467 tahun 2011
6. PT MUGHNI ENERGI BUMI, 122 Tahun 2012
7. PT RIZQI CAHAYA MAKMUR, 126 Tahun 2012
8. PT SANGIA PERKASA RAYA, 81 Tahun 2012
9. PT SRIWIJAYA RAYA, 340 Tahun 2009 dicabut dengan 146 Tahun 2015
10. PT WANAGON ANOA Indonesia, 382 Tahun 2011
11. CV ANA KONAWE, 441 Tahun 2011

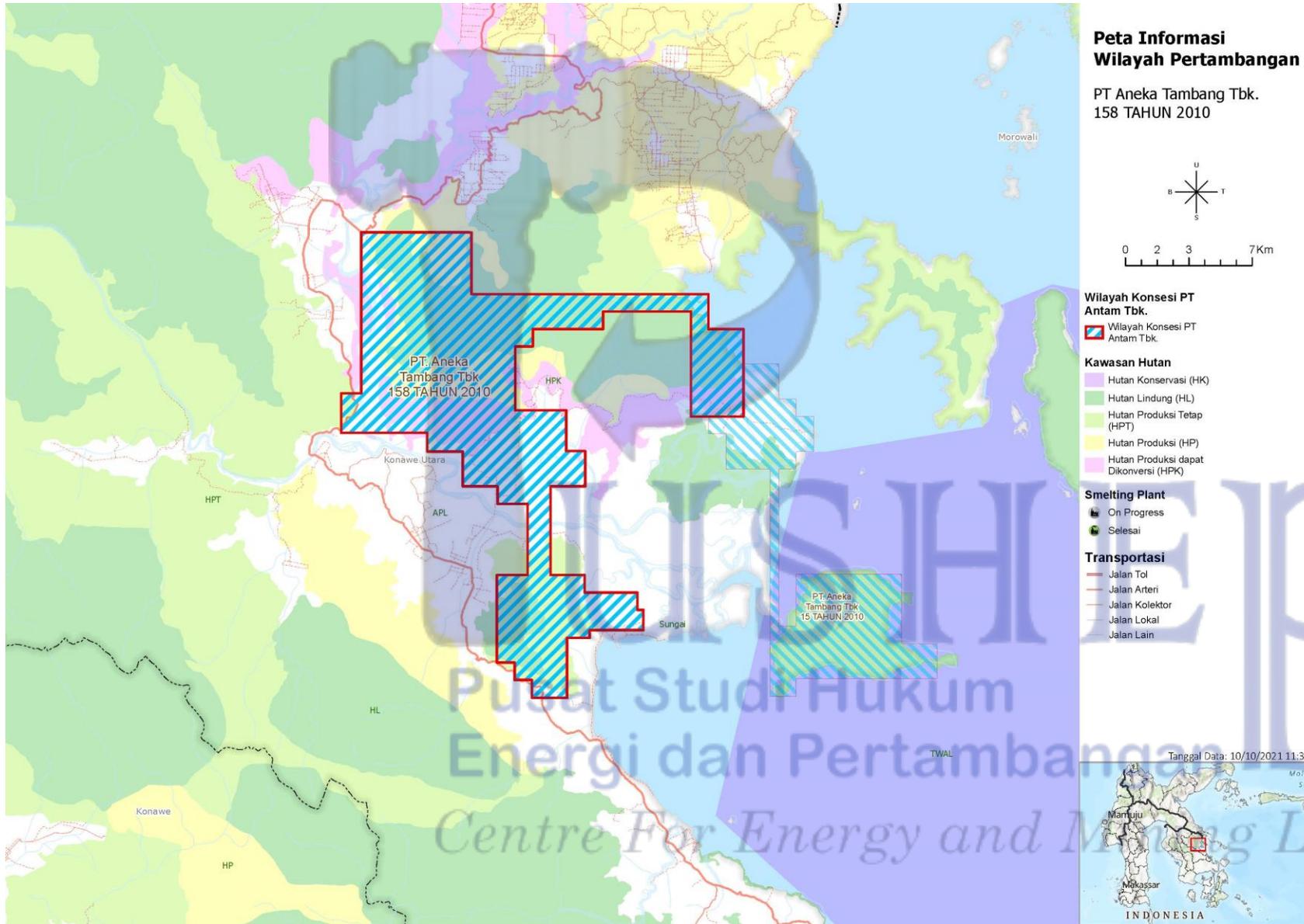
PENGGABUNGAN WILAYAH PT ANTAM



Pada 2010, melalui SK Bupati Konawe Utara No 158 Tahun 2010 WIUP PT Aneka Tambang KW 10 MRT 001 dan KW 99 NPP 001 digabungkan.

Proses penggabungan ini menimbulkan koridor kurang lebih seluas 450 Ha.

IUP NIKEL PT ANTAM TBK



No. SK: 158 Tahun 2010

Luas : 16.920 Ha

Lokasi:

Konawe Utara

Sulawesi Tenggara

Tahap Kegiatan:

Operasi Produksi

Aktif Hingga:

29 April 2030

Informasi Penggunaan Lahan :

Laut : 1,32%

HL : 35,86%

HP : 12,68%

HPT : 10,5%

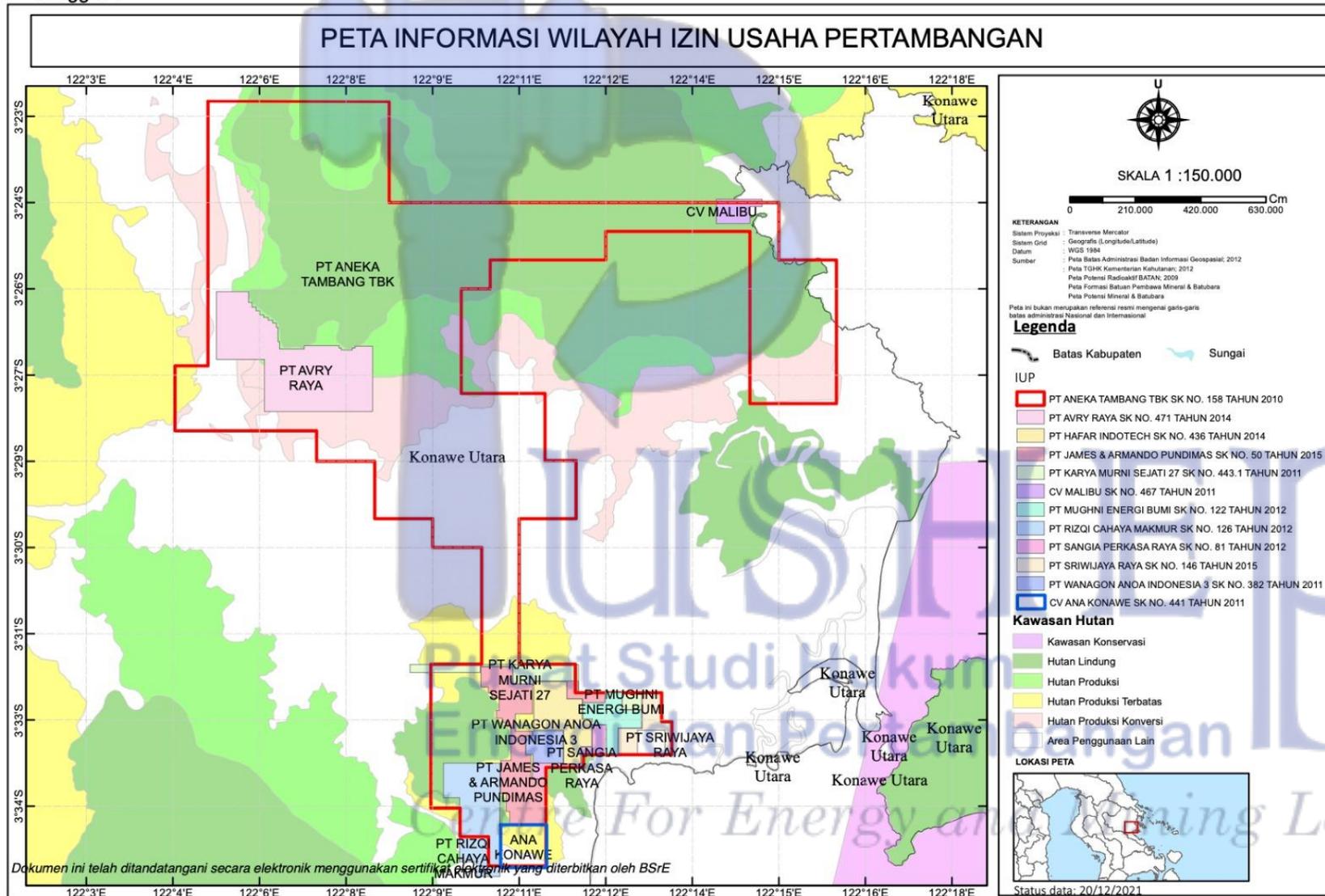
HPK : 13,31%

APL : 26,33%

- Pemukiman
- Pertanian Lahan Kering
- Area Penggunaan Lain
- Budidaya Perikanan
- Lahan Basah

(Perda RTRW Konut No. 20/2012)

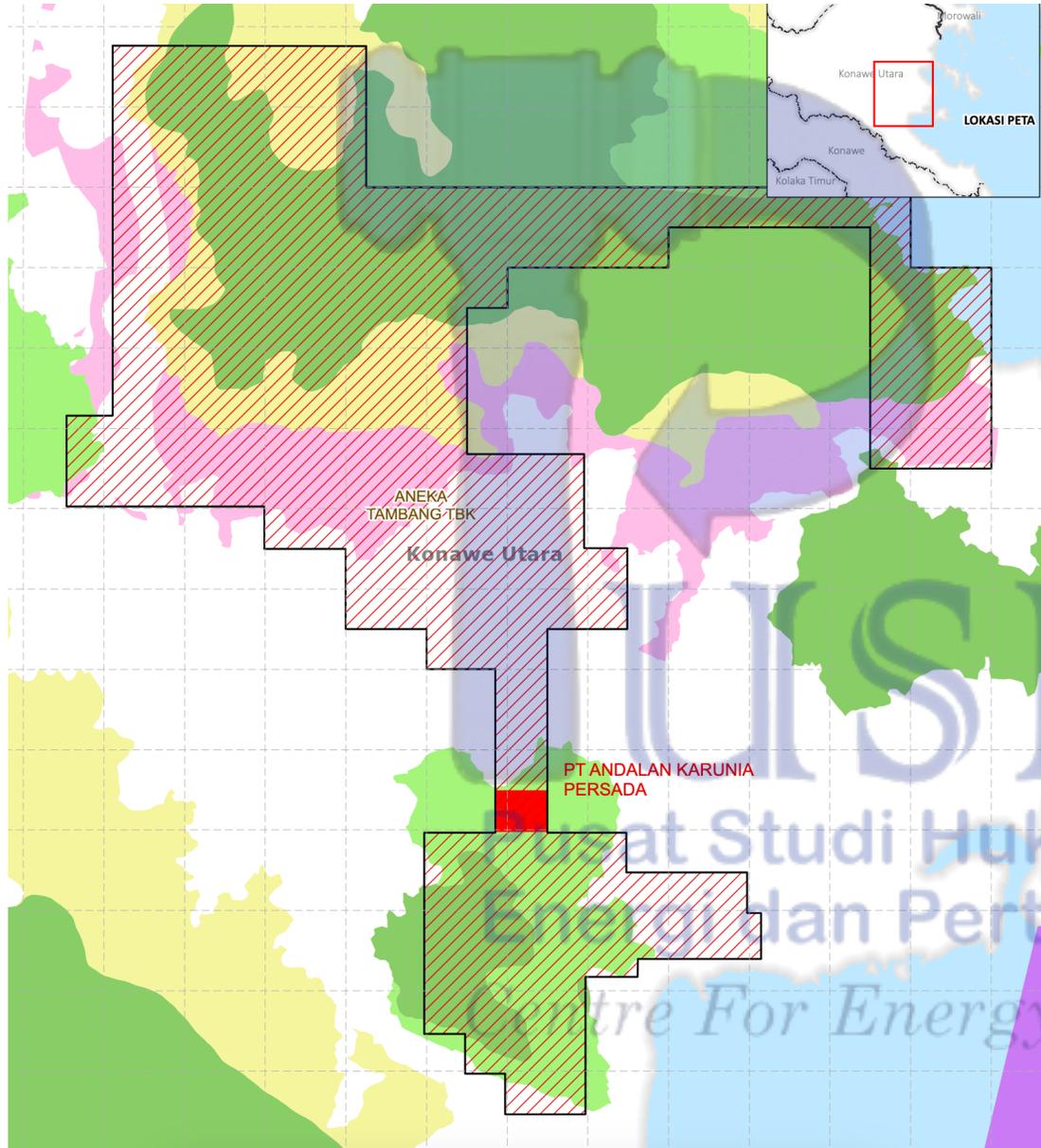
TUMPANG TINDIH IUP PT ANTAM MANDIODO



IUP PT Antam Blok Mandiodo (SK 158 Tahun 2010) dibatalkan pencabutannya sesuai Putusan Kasasi No. 05/2013, 77/2013, 225/2014, sehingga aktif kembali, namun pengadilan tidak memutuskan pencabutan atas 11 IUP yang tumpang tindih dengan PT Antam di Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan, Dirjen Minerba melalui surat No. T-1502/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 23 Desember 2021 menyampaikan bahwa perizinan lain yang berada di atas IUP PT Antam tidak diakui dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan perusahaan pertambangan.

TUMPANG TINDIH IUP PT ANTAM MANDIODO



Saat ini terdapat gugatan di pengadilan atas IUP PT Antam Mandiodo oleh PT Andalan Karunia Persada (PT AKP), di mana PT AKP mengajukan gugatan atas tumpang tindih IUP PT AKP dengan IUP PT Antam Mandiodo, pada wilayah koridor IUP PT Antam yang meluas pada saat penggabungan wilayah IUP.

Centre For Energy and Mining Law Studies

KRONOLOGI PT ANDALAN KARUNIA PERSADA



UPAYA PT ANTAM

1. Terhadap aktivitas ilegal mining yang terjadi di Blok Lasolo Lalindu Mandiodo yang telah berlangsung sejak tahun 2010, Pada tanggal 9 September 2021 ANTAM mengirimkan surat kepada Dirlidter Bareskrim Mabes POLRI untuk memohon dukungan dan bantuan untuk penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan pihak lain di atas IUP 158 ANTAM. Hal ini sebagai follow up atas Putusan MA No. 77 K, Putusan MA No. 225 K, dan Putusan MA No. 448 K.
2. ANTAM juga mengirimkan Surat No. 2041/272/DAT/2021 tertanggal 10 September 2021 kepada Dirjen Minerba memohon dukungan dan arahan dalam rangka menindaklanjuti eksekusi atas putusan MA No. 77 K, Putusan MA No. 225 K, dan Putusan MA No. 448 K.
3. Pada tanggal 16 - 30 September 2021, Tim Bareskrim Mabes POLRI melakukan penindakan di lapangan secara full tim oleh 25 personil Bareskrim yang terjun ke lapangan dan mengusir seluruh pelaku ilegal mining termasuk juga perusahaan swasta yang tumpang tindih dengan IUP OP ANTAM dan selama ini melakukan kegiatan pertambangan nikel di dalam IUP OP ANTAM di Mandiodo.
4. Pada tanggal 30 September 2021, Gubernur Sultra mengirimkan surat No. 540/4342 tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda UTAMA SULTRA dengan PT ANTAM Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo, Konawe Utara.

UPAYA PT ANTAM

4. Surat tersebut lalu ditindaklanjuti dengan dilakukannya proses pengadaan jasa kontraktor pertambangan di Blok Lasolo Lalindu Mandiodo sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di ANTAM dimana proses pengadaan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi di lapangan khususnya kedaruratan atas kehilangan asset negara berupa sumberdaya dan cadangan nikel yang telah terjadi sejak tahun 2010 serta pemberian kesempatan potensi keterlibatan Perumda Utama Sultra dan perusahaan lokal, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan mitra.
5. Perumda Utama Sultra membentuk Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. Lawu Agung Mining dimana KSO tersebut bernama KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT).
6. Pada tanggal 22 Desember 2021, ANTAM mengeluarkan kontrak jasa pertambangan di wilayah Mandiodo Lasolo Lalindu No. 9846/9231/DAT/2021 antara ANTAM dan KSO MTT.
7. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh KSO MTT di wilayah Mandiodo Lasolo Lalindu baru efektif berjalan di bulan Februari 2022 setelah keluarnya persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan dokumen no. B-182/MB.04/DJB.M/2022 pada tanggal 14 Januari 2022.

UPAYA PT ANTAM

7. Selama periode tahun 2022, telah terjadi aktivitas ilegal mining di wilayah Mandiodo Lasolo Lalindu yang dilakukan oleh pelaku ilegal mining dimana ANTAM telah melakukan patroli secara rutin, pengusiran pelaku ilegal mining dan pelaporan pelaku ilegal mining ke Aparat Penegak Hukum, Stakeholder dan Instansi terkait antara lain KAPOLRI, Dirlidptder Bareskrim Mabes POLRI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kapolda Sultra, Kapolres Konawe Utara, Danlanal Sultra, BPK RI Sultra, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Panglima TNI, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Bupati Konawe Utara, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, Ketua DPRD Konawe Utara, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Komandan Korem 143 Haluoleo, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang, Menkopohukum.
8. Adapun total surat pelaporan dan permohonan bantuan penegakan hukum yang telah dikirimkan oleh ANTAM selama tahun 2022 sebanyak 40 surat dan surat tersebut ditembuskan juga ke beberapa instansi pemerintah antara lain Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri KLHK, Menkopohukum, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Gubernur Sultra, Pangdam Hasanuddin, Dirjen Perhubungan Laut, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Propam Mabes POLRI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL).

UPAYA PT ANTAM

9. Surat laporan dari ANTAM tersebut saat ini telah ada beberapa yang ditanggapi dan ditindaklanjuti proses hukumnya dan telah masuk kedalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pengadilan antara lain oleh Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kapolda Sultra, Dirlitpidter Bareskrim Mabes POLRI, Kapolres Konawe Utara, Kejaksaan Tinggi Sultra. Diharapkan proses hukum tersebut dapat berjalan lancar sesuai aturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pelaku ilegal mining dan kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat ditindak secara tegas.



PROGRAM PPM PT ANTAM TBK SULTRA – KONAWE UTARA



PENDIDIKAN

- Beasiswa siswa/i SD, SMP, SMA
- Bedah sekolah/renovasi



KEMANDIRIAN EKONOMI

Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil menengah



c

Kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang PPM (Musrenkonut)



KESEHATAN

- Sarpras kesehatan (ambulance dan faskes)
- Program kesehatan masyarakat sekitar tambang (kesehatan ibu dan anak)



SOSIAL DAN BUDAYA

- Donasi kegiatan sosial/pemuda/masyarakat (sarana ibadah)
- Partisipasi kegiatan keagamaan
- Seminar pelestarian budaya lokal



INFRASTRUKTUR

Program pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM



TINGKAT PENDAPATAN RIIL ATAU PEKERJAAN

- Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan
- Pengembangan jasa dan kewirausahaan



LINGKUNGAN

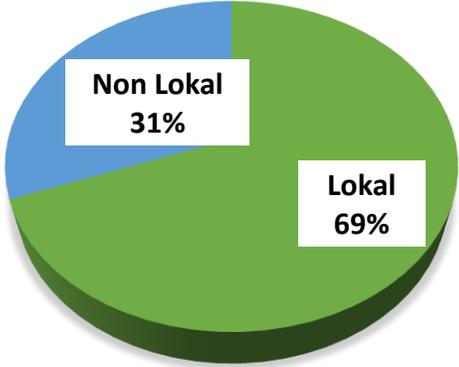
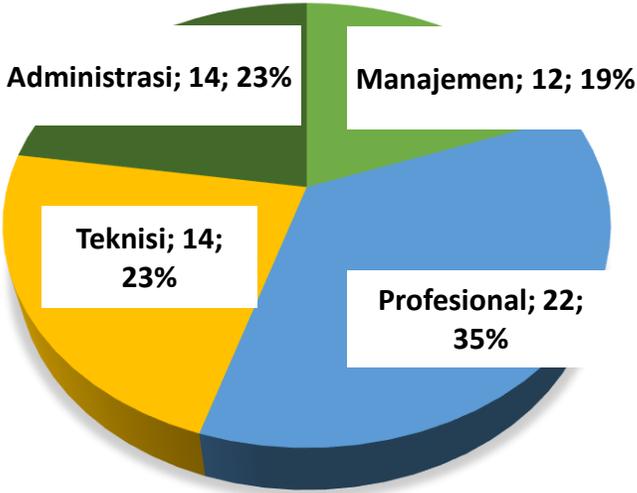
Partisipasi kegiatan lingkungan

TENAGA KERJA PT ANTAM TBK SULTRA – KONAWE UTARA

58

TOTAL TENAGA KERJA ORGANIK PT ANTAM TBK KONUT

TENAGA KERJA ORGANIK PT ANTAM TBK KONAWE UTARA 2020 – Q1 2023



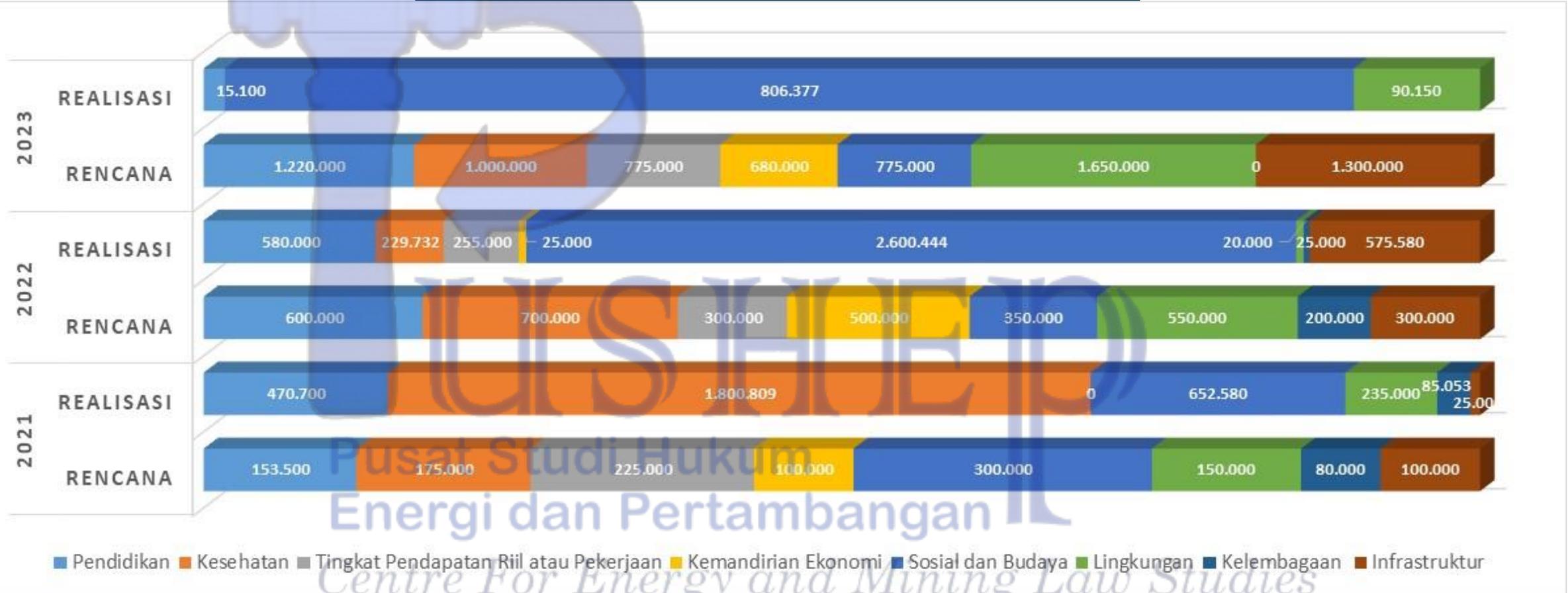
Realisasi Tenaga Kerja IUJP PT Antam Tbk Konawe Utara Tahun 2022

IUJP	Lokal	Non Lokal	Total
PT Satria Jaya Sultra	18	215	233
KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea	194	94	288
PT Dewi Jaya	65	2	67
Total	277	311	588

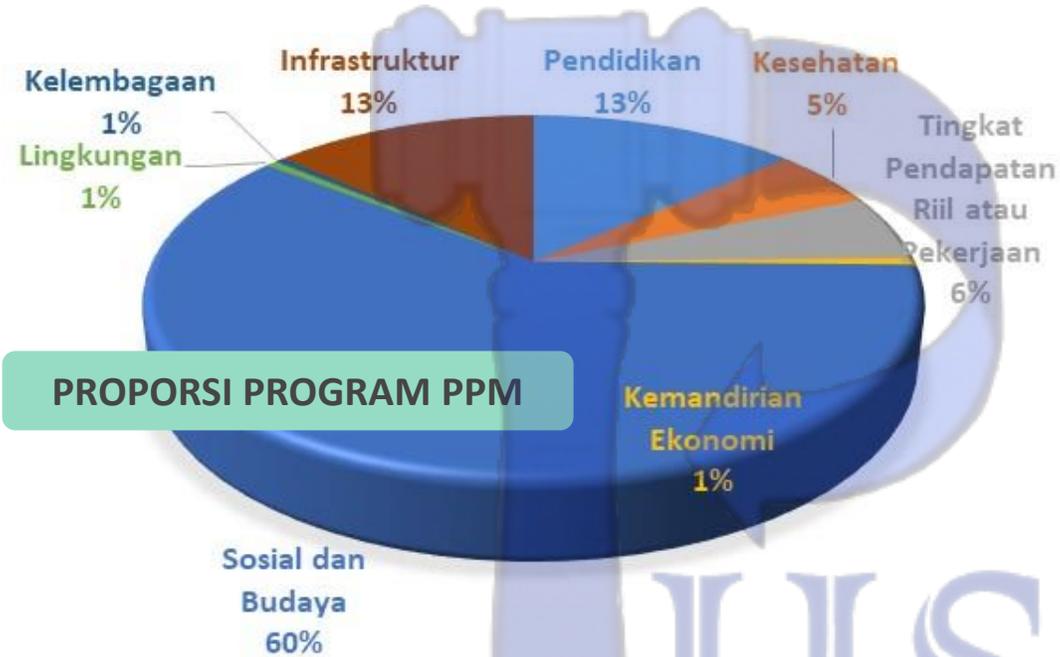


PROGRAM PPM PT ANTAM TBK SULTRA – KONAWE UTARA

RENCANA DAN REALISASI PPM 2021 – Q1 2023 PER PROGRAM UTAMA



PROGRAM PPM PT ANTAM TBK SULTRA – KONAWE UTARA



Area Penerima Manfaat

Program PPM PT Antam Tbk Konawe Utara mencakup wilayah di Kecamatan Molawe dan Lasolo-Lalindu, Tapunopaka, dan Mandiodo

RENCANA DAN REALISASI PPM 2021 – Q1 2023



KONTRIBUSI PT ANTAM TBK

Kontribusi PT ANTAM Tbk terhadap Perusda / Masyarakat Lokal untuk terlibat dalam Wilayah Tambang Mandiodo yaitu :

1. Jasa Katering
 - Koperasi Produsen Pertambangan Bumi Oheo Sejahtera
 - Ibu Desa Tapunopaka
2. Sewa Rumah Penduduk untuk penginapan Tim Keamanan
3. Penyedia ATK bagi perusahaan
 - Koperasi Dou Doule Ulu Bandaeha
4. Pemakaian jolor untuk transportasi laut
 - CV Molawe Jolor Konawe Utara
5. Kontraktor Sipil
 - CV Sangia Nibandera Construction
 - CV Kharisma Kembar Pratama
6. Rencana Kerjasama dengan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Sultra

TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**

Centre For Energy and Mining Law Studies



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870